LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN I TAHUN 2025

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU

LAPORAN MONEV
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN I TAHUN 2025 BKK KLS I PEKANBARU

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan perbaikan dan penataan terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan yang baik, efektif dan efesien (good governance), sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, lemahnya pengawasan, serta minimnya keterbukaan informasi publik.

Seiring dengan hal tersebut, serta didukung oleh perkembangan teknologi informasi, membuat masyarakat semakin menyadari bahwa mendapatkan informasi merupakan hak mereka sebagai warga negara. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi terutama terkait penyelengaraan pemerintahan, mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan agar setiap instansi pemerintah melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Kesehatan sebagai salah satu instansi pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kesehatan, Balai kekarantinaan kesehatan kelas I pekanbaru diwajibkan menerapkan keterbukaan informasi publik. Penerapan keterbukaan informasi publik ini juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Salah satu upaya yang perlu dilakukan guna peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi di BKK Kelas I Pekanbaru dilakukan secara berkala.

B. DASAR HUKUM

1. UU no.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepoteisme
2. UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. Permenkes no.37 th 2019 tentang pedoman pengelolaan info publik di lingkungan kemenkes
4. Permenkes RI nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Kemenkes
6. komisi informasi no.1 th 2017 tentang pengklasifikasian info publik

7. komisi informasi no.1 th 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik
8. komisi informasi no.1 th 2010 tentang standar layanan informasi publik

C. TUJUAN

1. Mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku.
2. Mengetahui masalah-masalah atau kekurangan dalam penyampaian, pengelolaan, dan distribusi informasi kepada masyarakat.
3. Memberikan Dasar Rekomendasi Perbaikan:
4. Menjamin bahwa badan publik bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas penyediaan informasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meningkat..
5. Memperkuat Pengawasan Publik dan memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terkait kinerja badan publik dalam menyediakan informasi.

II. HASIL KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di BKK Kelas I Pekanbaru selama triwulan I (Januari – Maret 2025)

B. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

- Melakukan monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BKK Kelas I Pekanbaru melalui website dan media sosial
- Melakukan evaluasi melalui wawancara terhadap Tim medsos, PPID terkait hambatan dan kendala
- Pelaporan dan penyampaian hasil melalui rapat Monev TW I BKK Kelas I Pekanbaru

C. HASIL MONITORING

Hasil monitoring dan Evaliasi Pelaksanaan keterbukaan informasi public di BKK Kelas I Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Layanan langsung di kantor

   Memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan informasi secara langsung. Namun, layanan ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jam operasional yang belum optimal, kurangnya petunjuk atau prosedur yang jelas bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi, keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang layanan informasi yang kurang memadai, dan registrasi /pencatatan.

2. Keterbukaan informasi publik melalui Media Sosial BKK kelas I Pekanbaru (Instagram, Youtube, Facebook)

   Selama periode bulan Januari s/d Maret 2025 Tim medsos telah melakukan update informasi kegiatan-kegiatan program di BKK kelas I Pekanbaru antara lain :

a. Dokumentasi kegiatan Pengawasan Arus mudik Nataru tahun 2024 -2025
b. Dokumentasi Kegiatan pengawasan pengamatan vector di BSSK II pekanbaru
c. Dokumentasi pelaksanaan upacara senin perdana di tahun 2025
d. Dokumentasi Hero of the month periode Desember 2024
e. Dokumentasi apel posko nataru
f. Hasil indeks kualitas pelayanan triwulan IV 2024
g. Sosialisasi tentang cek kesehatan gratis
h. Dokumentasi kegiatan Friday run
i. Dokumentasi kegiatan pertemuan strategis tentang penyakit HMPV di BSSK II Pekanbaru
j. Informasi tentang penyakit HMPV
k. Dokumentasi tentang pemeriksaan kebugaran
l. Dokumentasi tentang Evaluasi pelaksanaan vaksinasi internasional dan penerbitan ICV oleh faskes
m. Dokumentasi simulasi table top implementasi international ship and port facility security code di pelabuhan Pt.Indah kiat Perawang
n. Dokumentasi kegiatan coffee morning lintas sector pelabuhan di Hotel fox Pekanbaru
o. Informasi tentang e-ICV
p. Dokumentasi tentang apresiasi dan penghargaan atas kolaborasi dan partisipasi aktif dalam mendukung program logistic dan ecosystem secara nasional kepada BKK Pekanbaru oleh dirjen Bea dan Cukai
q. Dokumentasi kegiatan bakti social ke panti asuhan
r. Informasi tentang jam pelayanan di BKK Pekanbaru
s. Informasi tentang Buletin epidemiologi BKK Pekanbaru
t. Dokumentasi kegiatan apel pembukaan posko lebaran tahun 2025
u. Public campaigne tentang Gratifikasi dan dumas
v. Infografis tentang posko kesehatan pam arus mudik lebaran tahun 2025
w. Dokumentasi cek kesehatan gratis di Pelabuhan dan Bandara

3. Keterbukaan Informasi Publik melalui website (http://www.kkppekanbaru.com), adalah sebagai berikut :
   a. Tampilan menu di dashboard Website
      1) Pada menu Tupoksi masih menggunakan **PKSE, UKLW dan PRL**
      2) Pada menu Pelayanan : **survey kepuasan pelanggan update terakhir tahun 2023**
   b. **INFORMASI BERKALA adalah** informasi yang wajib diumumkan oleh badan publik secara rutin tanpa harus diminta oleh masyarakat. Informasi ini harus diperbarui secara berkala agar masyarakat dapat mengakses data yang relevan dan terbaru. Informasi berkala yang terdapat pada website BKK Kls I Pekanbaru terdiri dari :
      1) Informasi mengenai akses informasi publik :
         - Hak-hak memperoleh informasi publik
         - Hasil survey kepuasan masyarakat **(update terakhir th.2021)**

- Laporan dumas **(update terakhir th.2022)**
- Prosedur pengaduan dumas
- Tatacara prosedur pengajuan keberatan permohonan informasi public
- UPG **(tautan mengarah kepada pelaporan WBS)**
- WBS (tautan pelaporan WBS)

2) Informasi mengenai kegiatan kegiatan dan kinerja badan publik

- Laporan Humas semester I dan II **(update terakhir Th.2022)**
- laporan kinerja **(update terakhir th.2021 dan th.2022)**
- perjanjian kinerja **(update terakhir th.2021)**
- RAK **(update terkhir th. 2020-2024)**
- Rencana kerja tahunan **(update terakhir th.2021 & 2022)**

3) Informasi mengenai Keuangan Badan Publik

- informasi mengenai keuangan badan publik **(update terakhir th. 2021)**
- Informasi Peringatan Dini Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Kantor
- Prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran

4) Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja

- informasi tentang pengumuman barang dan jasa **(update terakhir th.2022)**

5) Informasi tentang tata cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang pejabat Satker

- Informasi pelaporan Whistle blowing system

6) Informasi yang berkaitan dengan profil Badan Publik

- Alamat satuan kerja
- Fungsi satuan kerja
- **Laporan LHKPN KKP Pekanbaru terverifikasi KPK th.2021**
- **Profil BKK (update terakhir th. 2021)**
- Tugas pokok satuan kerja **(tautan tidak dapat diakses)**

7) Peraturan/Kepuasaan/Kebijakan yang digunakan tekait tupoksi satker

- Kebijakan pelayanan KKP Kelas II Pekanbaru **(link tidak dapat diakses)**
- Standar pelayanan vaksinasi internasional **(link tidak dapat diakses)**

c. **INFORMASI SETIAP SAAT adalah** informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik secara terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat kapan saja ketika diminta. Informasi ini harus selalu tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah oleh publik

1) Daftar informasi public

- Ringkasan daftar informasi public **(tautan link tidak dapat diakses)**

2) Data statistik yang dibuat/dikelola oleh BP
   - Data statistik yang dibuat/dikelola oleh BP
   - Data sumber daya manusia (SDM) KKP PKU th.2021 **(tautan link tidak dapat diakses)**
   - Data tren kinerja KKP PKU th.2021 **(tautan link tidak dapat diakses)**
3) Dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat KKP Kelas II Pekanbaru dalam rangka pelaksanan tugas pokok dan fungsinya
   - Dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat KKP Kelas II Pekanbaru dalam rangka pelaksanan tugas pokok dan fungsi **(tautan link tidak dapat diakses)**
4) Informasi Barang Milik Negara (BMN) Publik
   - Laporan BMN tahun 2021 **(tautan link tidak dapat diakses)**
5) Informasi data statistik Kepegawaian dan Keuangan BKK Kelas I Pekanbaru
   - Data kepegawaian KKP kelas II Pekanbaru th.2021
6) Informasi Laporan harta kekayaaan bagi pejabat negara di BKK Kelas I Pekanbaru yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
   - Laporan LHKPN KKP Kelas II Pekanbaru th.2020 & th.2021
7) Informasi mengenai keputusan BP
   - SK Dumas th.2021 **(tautan link tidak dapat diakses)**
   - SK Pengawas interna PIPK th.2019 **(tautan link tidak dapat diakses)**
   - SK Satgas Benturan kepentingan th.2021**(tautan link tidak dapat diakses)**
   - SK SPIP th.2021 **(update terakhir th. 2021)**
   - SK Tim penegakan disiplin pns th.2021 **(tautan link tidak dapat diakses)**
   - SK Tim pengelolaan Dumas SPAN Lapor **(update terakhir th. 2022)**
   - SK Tim ZI WBK/WBBM th.2021 **(update terakhir th. 2021)**
   - SK UPG th.2021 **(tautan link tidak dapat diakses)**
8) Informasi mengenai Peringatan Dini dan Evakuasi
   - Gempa Bumi **(tautan link tidak dapat diakses)**
   - Jalur evakuasi **(tautan link tidak dapat diakses)**
   - Penanggulangan kebakaran **(tautan link tidak dapat diakses)**
   - Titik kumpul **(tautan link tidak dapat diakses)**

9) Informasi mengenai rencana strategis dan rencana Balai kekarantinaan kesehatan kelas I pekanbaru
   - RAK tahun 2024 awal **(tautan link tidak dapat diakses)**
   - RAK tahun 2024 revisi **(tautan link tidak dapat diakses)**
   - Rencana Strategis Kemenkes th. 2020-2024 **(tautan link tidak dapat diakses)**

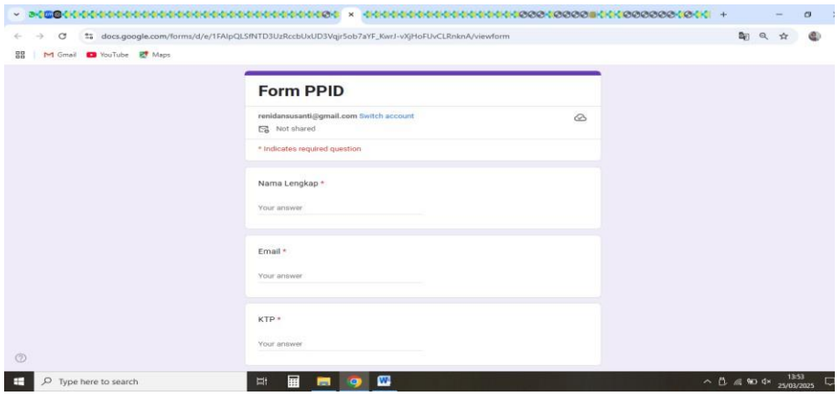
10) Informasi rencana kerja KKP Kelas II Pekanbaru
    - Rencana kerja Tahunan KKP Kelas II Pekanbaru Th. 2019, Th.2020, Th.2021 **(tautan link tidak dapat diakses)**
11) Informasi mengenai penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BKK Kelas I Pekanbaru
    - Informasi mengenai penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai **(tautan link tidak dapat diakses)**
12) Informasi tentang PPID BKK Kelas I Pekanbaru
    - SK Pengelola PPID th. 2021 **(update terakhir th. 2021)**
13) Informasi tentang surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
    - Perjanjian kerjasama KKP Kls II Pku th.2021 dengan Stikes Al Insyiroh
    - Perjanjian kerjasama KKP Kls II Pku th.2021 dengan Stikes Hangtuah **(tautan link tidak dapat diakses)**
    - Perjanjian kerjasama KKP Kls II Pku th.2021 dengan Stikes Payung Negri
    - Perjanjian kerjasama KKP Kls II Pku th.2021 dengan Fakultas Kedokteran UNRI **(tautan link tidak dapat diakses)**
14) Peraturan / regulasi
    - PMK No.77 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesehatan pelabuhan **(PMK yang berlaku adalah PMK Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan)**
    - PP No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana
    - PP No.72 Tahun 2012 tentang system kesehatan nasional
    - UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan **(telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)**
    - UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenanga kesehatan (**telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)**

d. **INFORMASI SERTA MERTA** adalah informasi yang wajib diumumkan dan disebarluaskan oleh badan publik secara langsung dan tanpa penundaan karena menyangkut keselamatan orang banyak dan ketertiban umum. Informasi ini harus segera tersedia agar masyarakat dapat mengetahui dan mengambil tindakan yang diperlukan.
    - SOP Evakuasi kebakaran dan gempa bumi
    - SOP Pemeriksaan Kesehatan Pekerja
    - SOP Penanganan Kecelakaan Kerja
    - SOP Tanggap Darurat (Kecelakaan, Terpeleset, Terkena cairan kimia, dll

e. **INFORMASI DIKECUALIKAN adalah** informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena dapat membahayakan kepentingan negara, hak pribadi, atau rahasia bisnis. Informasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh BKK Kelas I Pekanbaru adalah:

- Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas
- Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : arsip dokumen kepegawaian identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin, identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian)
- Data identitas pengaduan masyarakat
- Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan
- Dokumen pengawasan tender
- Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa

f. **Permohonan informasi pulik melalui website (PPID) adalah** Mekanisme yang disediakan oleh badan publik untuk memungkinkan masyarakat mengajukan permintaan informasi secara online dengan mengisi form pada website BKK Kls I Pekanbaru



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATKER BKK KELAS I PEKANBARU
TRIWULAN I TAHUN 2025

Bulan : Januari - Maret 2025

NO	No.register permohonan informasi	Waktu penyelesaian sengketa	Permohonan informasi publik yang dikabulkan	Permohonan informasi publik yang ditolak	Permohonan keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa informasi			Keterangan
						Komisi informasi	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7			8
NIHIL									

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari admin/pengelola website & PPID selama periode Januari s/d Maret 2025 tidak ada permohonan informasi yang diterima.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa upaya keterbukaan informasi publik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui berbagai saluran, yaitu layanan langsung di kantor, media sosial, dan website. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu segera ditangani, antara lain:

1. Layanan Langsung di Kantor : Meskipun telah memberikan akses kepada masyarakat, masih terdapat keterbatasan jam operasional, kurangnya petunjuk prosedural yang jelas, keterbatasan fasilitas, serta sistem pencatatan yang belum optimal.
2. Keterbukaan melalui Media Sosial : Informasi terkait kegiatan dan program telah rutin diupdate, namun perlu peningkatan dalam hal konsistensi dan interaksi untuk menjamin informasi yang disampaikan selalu relevan dan mudah dipahami.
3. Keterbukaan melalui Website: Informasi berkala, setiap saat, serta serta merta telah tersedia, namun masih perlu diupdate dan beberapa tautan /dokumen tidak dapat diakses, sehingga mengurangi efektivitas layanan informasi yang disediakan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

1. SARAN

a. Perlu dilakukan penataan ulang susunan/tata letak menu pada dashboard website BKK Pekanbaru agar tampilan data lebih teratur, sistematis, dan mudah diakses.

b. Penyusunan informasi berkala, setiap saat, dan serta merta pada Menu PPID agar mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sebagai berikut:

1) Informasi Berkala

- Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
  yaitu : gambaran umum, struktur organisasi,tugas dan fungsi, visi misi,alamat, Laporan Profil, dll
- Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
  Yaitu : Rencana Aksi Kegiatan, ,Perjanjian kinerja,Rencana Kerja Tahunan, Rencana kerja dan anggaran, Laporan kinerja, Laporan Tahunan, dll
- Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  Yaitu : Laporan keuangan
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

2) Informasi Setiap saat

- Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
- Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
- Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya

- Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
- Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
- Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
- Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3) Informasi Serta merta

- Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

2. **REKOMENDASI**

a. Peningkatan Layanan Informasi Langsung di Kantor

Menyediakan tempat layanan informasi yang lebih nyaman dan fasilitas pendukung seperti meja layanan informasi

b. Optimalisasi Keterbukaan Informasi di Media Sosial

Meningkatkan frekuensi pembaruan informasi dengan memastikan semua kegiatan strategis dan pengumuman penting dipublikasikan tepat waktu.

c. Pengelolaan dan Pembaruan Informasi di Website (Peningkatan Aksesibilitas Informasi Berkala, setiap saat dan serta merta)

- Memperbarui informasi berkala secara konsisten, terutama yang terkait dengan laporan kegiatan /kinerja, pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan layanan.
- Melakukan monitoring berkala terhadap daftar informasi publik untuk memastikan data tetap relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

d. Membentuk tim khusus atau koordinator PPID yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan informasi publik.

Mengetahui,
Kepala BKK Kelas I Pekanbaru

dr. Aryanti, M.M, MKM
NIP. 196906072001122002

Pekanbaru, Maret 2025
Ketua Pokja Penataan Tatalaksana

Nova Setya Ningsih,SE NIP.
198411262009122002

LAPORAN MONEV

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TRIWULAN II TAHUN 2025 BKK KLS I PEKANBARU



BKK KELAS I PEKANBARU
TAHUN 2025

LAPORAN MONEV
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN II TAHUN 2025 BKK KLS I PEKANBARU

I.PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan perbaikan dan penataan terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan yang baik, efektif dan efesien (good governance), sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, lemahnya pengawasan, serta minimnya keterbukaan informasi publik.

Seiring dengan hal tersebut, serta didukung oleh perkembangan teknologi informasi, membuat masyarakat semakin menyadari bahwa mendapatkan informasi merupakan hak mereka sebagai warga negara. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi terutama terkait penyelengaraan pemerintahan, mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan agar setiap instansi pemerintah melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Kesehatan sebagai salah satu instansi pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kesehatan, Balai kekarantinaan kesehatan kelas I pekanbaru diwajibkan menerapkan keterbukaan informasi publik. Penerapan keterbukaan informasi publik ini juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Salah satu upaya yang perlu dilakukan guna peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi di BKK Kelas I Pekanbaru dilakukan secara berkala.

B. DASAR HUKUM

1. UU no.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepoteisme
2. UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. Permenkes no.37 th 2019 tentang pedoman pengelolaan info publik di lingkungan kemenkes
4. Permenkes RI nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Kemenkes
6. komisi informasi no.1 th 2017 tentang pengklasifikasian info publik

7. komisi informasi no.1 th 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik
8. komisi informasi no.1 th 2010 tentang standar layanan informasi publik

C. TUJUAN

1. Mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku.
2. Mengetahui masalah-masalah atau kekurangan dalam penyampaian, pengelolaan, dan distribusi informasi kepada masyarakat.
3. Memberikan Dasar Rekomendasi Perbaikan:
4. Menjamin bahwa badan publik bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas penyediaan informasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meningkat..
5. Memperkuat Pengawasan Publik dan memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terkait kinerja badan publik dalam menyediakan informasi.

II. HASIL KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di BKK Kelas I Pekanbaru selama triwulanII (April – Juni 2025)

B. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

- Melakukan monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BKK Kelas I Pekanbaru melalui website dan media sosial
- Melakukan evaluasi melalui wawancara terhadap Tim medsos, PPID terkait hambatan dan kendala
- Pelaporan dan penyampaian hasil melalui rapat Monev TW II BKK Kelas I Pekanbaru

C. HASIL MONITORING

Hasil monitoring dan Evaliasi Pelaksanaan keterbukaan informasi public di BKK Kelas I Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. SK Pengelola PPID dan SK Tim Media Sosial Tahun 2025 telah diperbarui.
   Dokumen tersebut kini telah disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur organisasi terbaru. Pembaruan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan informasi publik di lingkungan BKK Kelas I Pekanbaru.
2. Layanan langsung di kantor
   Layanan ini memberikan akses langsung kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Saat ini, meja informasi telah tersedia dan menjadi salah satu sarana utama dalam memberikan pelayanan informasi secara langsung
3. Keterbukaan informasi publik melalui Media Sosial BKK kelas I Pekanbaru (Instagram, Youtube, Facebook)
   Selama periode bulan April s/d Juni 2025 Tim medsos telah melakukan update informasi kegiatan-kegiatan program di BKK kelas I Pekanbaru antara lain :
   a. Infografis tentang posko kesehatan pam arus mudik lebaran tahun 2025

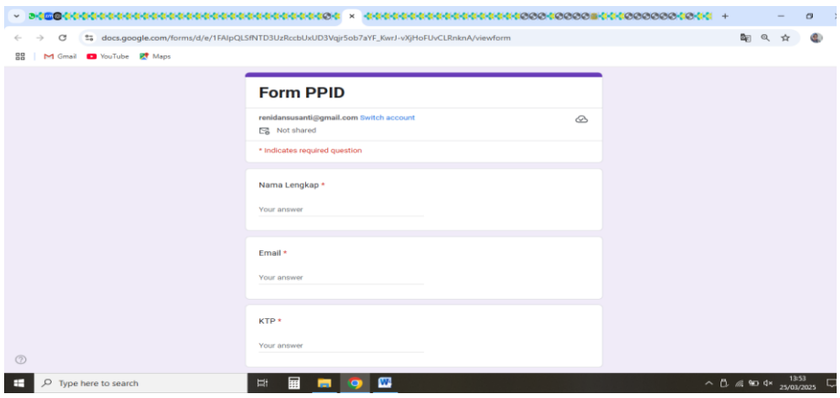
b. Buletin Epidemiologi Mingguan
c. Dokumentasi upacara rutin
d. Dokumentasi rapat koordinasi bulan April
e. Hasil indeks kualitas pelayanan TW I 2025
f. Dokumentasi kegiatan pemeriksaan kebugaran pegawai BKK
g. Dokumentasi kegiatan hari Kartni di BKK Pekanbaru
h. Komitmen membangun zona integritas di BKK Pekanbaru (Public campaign komitmen tidak menerima gratifikasi)
i. Dokumentasi rapat monev WBK TW I tahun 2025
j. Dokumentasi Sosialisasi program kekerantinaan kesehatan di pintu masuk Negara
k. Public campaign Stop gratifikasi
l. Dokumentasi hari lahirnya pancasila
m. Dokumentasi pelepasan mahasiswa Ikes Payung negeri
n. Dokumentasi acara Graound breaking RS Kemenkes Riau
o. Public Campaigne stop gratifikasi
p. Dokumentasi kegiatan orientasi lapangan CPNS di BKK Pekanbaru
q. Dokumentasi koodinasi dengan Basarnas
r. Dokumentasi kegiatan sharing session ultimate service and financial planner
s. Dokumentasi kegiatan Run club BKK Pekanbaru
t. Informasi tentang SE Kemenkes No.HK.02.02/A/1206/2025 tentang pelaksanaan imunisasi bagi Jemaah haji dan umroh,pelaku perjalanan wajib melakukan vaksinasi meningitis meningococcus dan poliomyelitis
u. Informasi layanan pengaduan masyarakat
v. Dokumentasi kegiatan memperingati tahun baru islam 1 muharam

4. Keterbukaan Informasi Publik melalui website (http://www.kkppekanbaru.com), adalah sebagai berikut :
   a. Tampilan menu di dashboard Website
      Pada menu Tupoksi telah diupdate namun untuk detail isian masih dalam proses penyusunan.
   b. Informasi Berkala, Informasi setiap saat dan informasi serta merta
      Berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar informasi publik, baik yang termasuk dalam kategori Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, maupun Informasi Serta Merta, masih dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran. Saat ini, proses pengumpulan dan verifikasi laporan oleh masing-masing unit kerja masih berlangsung. Setelah laporan-laporan tersebut tersedia dan memenuhi standar keterbukaan informasi publik, maka akan segera diunggah dan dipublikasikan melalui website resmi BKK Kelas I Pekanbaru, agar dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
   c. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena dapat membahayakan kepentingan negara, hak pribadi, atau rahasia bisnis. Informasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh BKK Kelas I Pekanbaru adalah:

- Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas
- Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : arsip dokumen kepegawaian identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin, identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian)
- Data identitas pengaduan masyarakat
- Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan
- Dokumen pengawasan tender
- Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa

d. Permohonan informasi pulik melalui website (PPID) adalah Mekanisme yang disediakan oleh badan publik untuk memungkinkan masyarakat mengajukan permintaan informasi secara online dengan mengisi form pada website BKK Kls I Pekanbaru



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATKER BKK KELAS I PEKANBARU
TRIWULAN II TAHUN 2025

Bulan : April - Juni 2025

NO	No.register permohonan informasi	Waktu penyelesaian sengketa	Permohonan informasi publik yang dikabulkan	Permohonan informasi publik yang ditolak	Permohonan keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa informasi			Keterangan
						Komisi informasi	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7			8
NIHIL									

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari admin/pengelola website & PPID selama periode April s/d Juni 2025 tidak ada permohonan informasi yang diterima.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa upaya keterbukaan informasi publik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui berbagai saluran, yaitu layanan langsung di kantor, media sosial, dan website. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu segera ditangani, antara lain:

1. Layanan Langsung di Kantor : Layanan ini memberikan akses langsung kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Saat ini, meja informasi telah tersedia dan menjadi salah satu sarana utama dalam memberikan pelayanan informasi secara langsung
2. Keterbukaan melalui Media Sosial : Informasi terkait kegiatan dan program telah rutin diupdate
3. Keterbukaan melalui Website: Informasi berkala, setiap saat, serta serta merta masih dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran. Saat ini, proses pengumpulan dan verifikasi laporan oleh masing-masing unit kerja masih berlangsung. Setelah laporan-laporan tersebut tersedia dan memenuhi standar keterbukaan informasi publik, maka akan segera diunggah dan dipublikasikan melalui website resmi BKK Kelas I Pekanbaru, agar dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Memaksimalkan SK Pengelola PPID dan tim medsos terbaru (Tahun 2025) untuk mengaktifkan kembali peran strategis dalam mengoordinasikan pengelolaan dan penyajian informasi publik. Mendorong masing-masing unit kerja untuk menyelesaikan pengumpulan dokumen sesuai kategori informasi publik (berkala, setiap saat, serta-merta)

Mengetahui, Kepala BKK Kelas I Pekanbaru	Pekanbaru, Juli 2025 Ketua Pokja Penataan Tatalaksana
dr. Aryanti, M.M, MKM NIP. 196906072001122002	Nova Setya Ningsih,SE NIP. 198411262009122002

LAPORAN MONEV

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TRIWULAN III TAHUN 2025 BKK KLS I PEKANBARU



BKK KELAS I PEKANBARU
TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN MONEV
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN III TAHUN 2025 BKK KLS I PEKANBARU

I.PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan perbaikan dan penataan terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan yang baik, efektif dan efesien (good governance), sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, lemahnya pengawasan, serta minimnya keterbukaan informasi publik.

Seiring dengan hal tersebut, serta didukung oleh perkembangan teknologi informasi, membuat masyarakat semakin menyadari bahwa mendapatkan informasi merupakan hak mereka sebagai warga negara. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi terutama terkait penyelengaraan pemerintahan, mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan agar setiap instansi pemerintah melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Kesehatan sebagai salah satu instansi pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kesehatan, Balai kekarantinaan kesehatan kelas I pekanbaru diwajibkan menerapkan keterbukaan informasi publik. Penerapan keterbukaan informasi publik ini juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Salah satu upaya yang perlu dilakukan guna peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi di BKK Kelas I Pekanbaru dilakukan secara berkala.

B. DASAR HUKUM

1. UU no.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepoteisme
2. UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. Permenkes no.37 th 2019 tentang pedoman pengelolaan info publik di lingkungan kemenkes
4. Permenkes RI nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Kemenkes
6. komisi informasi no.1 th 2017 tentang pengklasifikasian info publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. komisi informasi no.1 th 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik
8. komisi informasi no.1 th 2010 tentang standar layanan informasi publik

C. TUJUAN

1. Mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku.
2. Mengetahui masalah-masalah atau kekurangan dalam penyampaian, pengelolaan, dan distribusi informasi kepada masyarakat.
3. Memberikan Dasar Rekomendasi Perbaikan:
4. Menjamin bahwa badan publik bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas penyediaan informasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meningkat..
5. Memperkuat Pengawasan Publik dan memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terkait kinerja badan publik dalam menyediakan informasi.

II. HASIL KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di BKK Kelas I Pekanbaru selama triwulan III (Juli – September 2025)

B. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

- Melakukan monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BKK Kelas I Pekanbaru melalui website dan media sosial
- Melakukan evaluasi melalui wawancara terhadap Tim medsos, PPID terkait hambatan dan kendala
- Pelaporan dan penyampaian hasil melalui rapat Monev TW 3 BKK Kelas IPekanbaru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. HASIL MONITORING

Hasil monitoring dan Evaliasi Pelaksanaan keterbukaan informasi public di BKK Kelas I Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Layanan langsung di kantor

   Layanan ini memberikan akses langsung kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Saat ini, meja informasi telah tersedia dan menjadi salah satu sarana utama dalam memberikan pelayanan informasi secara langsung

2. Keterbukaan informasi publik melalui Media Sosial BKK kelas I Pekanbaru (Instagram, Youtube, Facebook)

   Selama periode bulan Juli s/d September 2025 Tim medsos telah melakukan update informasi kegiatan-kegiatan program di BKK kelas I Pekanbaru antara lain :

   a. Dokumentasi kegiatan Pemeriksaan kesehatan gratis di pelabuhan Perawang
   b. Dokumentasi Upacara di BKK Pekanbaru
   c. Hasil survey kepuasan masyarakat
   d. Dokumentasi kegiatan Tes kebugaran
   e. Dokumentasi kegiatan pengawasan alat angkut ,orang dan barang di Pelabuhan Selat Panjang
   f. Dokumentasi kegiatan Food security di Terminal VVIP Lancang kuning BSSK II Pekanbaru
   g. Publik campaign tentang Konflik kepentingan
   h. Dokumentasi Sertijab Kepala BKK Kls I Pekanbaru
   i. Buletin Epidemiologi
   j. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi prosedur izin dan tata cara angkut jenazah dengan pesawat terbang
   k. Dokumentasi Pelatihan Safety boarding for health quarantine officer
   l. Dokumentasi Upacara peringatan HUT RI ke 80
   m. Publik campaign tentang whistle blowing system
   n. Dokumentasi kegiatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit TB dan HIV Aids di wilayah kerja
   o. Informasi tentang cara kerja All Indonesia
   p. Dokumentasi kegiatan monev realisasi anggaran
   q. Dokumentasi kegiatan Bimbingan teknis penerapan standar kekarantinaan kesehatan dalam penanganan jenazah di RS Bhayangkara
   r. Panduan peregangan Desk friendly
   s. Dokumentasi kegiatan Uji resistensi insektisida
   t. Dokumentasi pelatihan soft skill, manajemen emosi dan komunikasi efektif oleh universitas Hangtuah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Keterbukaan Informasi Publik melalui website (http://www.bkkpekanbaru.com), adalah sebagai berikut :
   a. Tampilan menu di dashboard Website

      Menu Tugas dan Fungsi (Tupoksi) dan detail informasi pada setiap unit kerja saat telah diperbarui sesuai dengan struktur organisasi terbaru.

   b. Daftar informasi publik BKK Kelas I Pekanbaru Tahun 2025
      1) Profil Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      2) Tupoksi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      3) Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      4) Profil Pejabat Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      5) Jenis Layanan Publik Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      6) Visi dan Misi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      7) Rekapitulasi Rekap Wajib Lapor LHKPN
      8) Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      9) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      10) Perjanjian Kinerja (PK) Balai Kekarantinaan
      11) Rencana Kerja dan Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      12) Rilis Berita Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      13) Media Pengumuman (File Pengumuman dapat diunduh oleh semua)
      14) Buletin Elektronik (LAKKSAMANA)
      15) Laporan Tahunan Tahun 2024
      16) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024
      17) Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      18) DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      19) Informasi Jumlah Pemohon Informasi
      20) Daftar Informasi Publik (DIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      21) Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      22) Rekapitulasi Pengadaan barang / jasa Pemerintah
      23) Informasi Tentang Hasil Pelaksanaan Kegiatan
      24) SOP AP Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      25) Peta Jabatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      26) Daftar Komposisi Pegawai (Nama, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan)
      27) Data Statistik Keuangan
      28) Data Inventarisir BMN
      29) Laporan Keuangan Audited Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

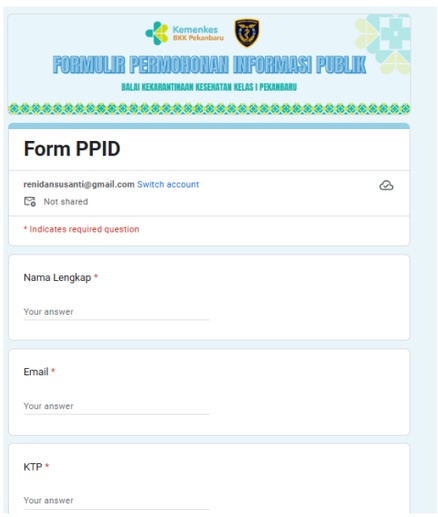
30) Laporan Barang Milik Negara (BMN) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
31) Laporan Pengaduan Masyarakat Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
32) Maklumat Pelayanan Informasi Publik
33) Tata cara Permohonan Informasi
34) Tata cara Pengajuan Keberatan
35) Tata cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
36) Tata cara Pengaduan Masyarakat
37) Ringkasan Laporan Layanan Informasi
38) SK PPID Tahun 2025

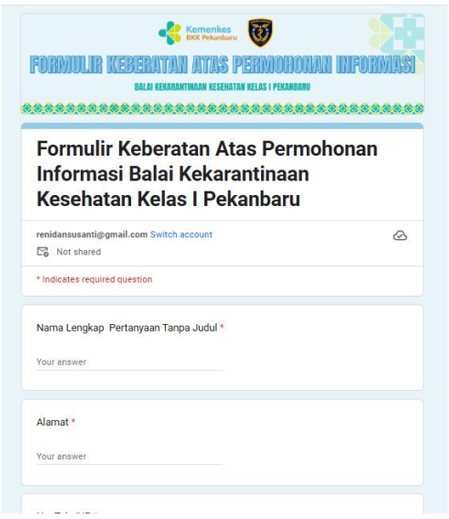
c. Informasi Berkala, Informasi setiap saat dan informasi serta merta
Proses pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran seluruh kategori informasi publik telah diselesaikan. Dengan demikian, seluruh Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta kini telah diperbarui dan dipublikasikan melalui website resmi BKK Kelas I Pekanbaru**,** sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik..

d. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena dapat membahayakan kepentingan negara, hak pribadi, atau rahasia bisnis. Informasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh BKK Kelas I Pekanbaru adalah:
- Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas
- Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : arsip dokumen kepegawaian identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin, identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian)
- Data identitas pengaduan masyarakat
- Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan
- Dokumen pengawasan tender
- Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa

e. Permohonan informasi pulik melalui website (PPID) adalah Mekanisme yang disediakan oleh badan publik untuk memungkinkan masyarakat mengajukan permintaan informasi secara online dengan mengisi form pada website BKK Kls I Pekanbaru
Telah dilakukan update menu dan tampilan di website sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



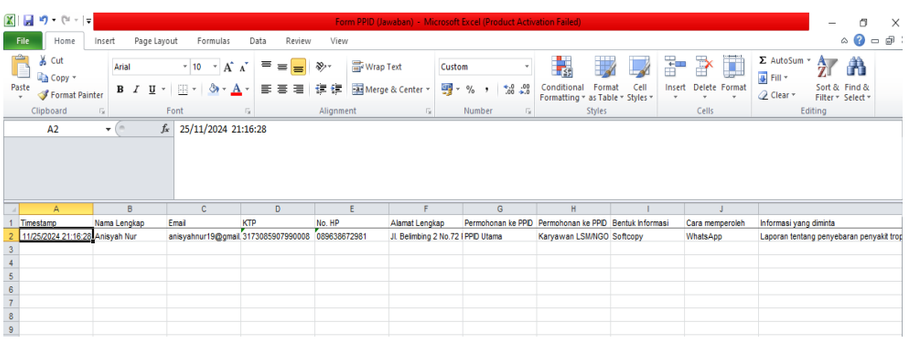


LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATKER BKK KELAS I PEKANBARU
TRIWULAN III TAHUN 2025

Bulan :Juli - September 2025

NO	No.register permohonan informasi	Waktu penyelesaian sengketa	Permohonan informasi publik yang dikabulkan	Permohonan informasi publik yang ditolak	Permohonan keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa informasi			Keterangan
						Komisi informasi	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7			8

NIHIL



Berdasarkan informasi yang diperoleh dari admin/pengelola website & PPID selama periode Juli s/d September 2025 tidak ada permohonan informasi yang diterima.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan

   Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, serta mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada periode minggu keempat Juni hingga minggu kedua September 2025. Kegiatan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang dilakukan oleh BKK Kelas I Pekanbaru sebagai PPID Pelaksana yang merupakan bagian dari proses evaluasi mandiri atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di unit kerja yang terdiri dari :

   a. Indikator pengembangan website
   b. Indikator pengumuman informasi publik
   c. Indikator pelayanan informasi publik
   d. Indikator penyediaan informasi publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa upaya keterbukaan informasi publik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui berbagai saluran, yaitu layanan langsung di kantor, media sosial, dan website. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu segera ditangani, antara lain:

1. Layanan Langsung di Kantor : Layanan ini memberikan akses langsung kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Saat ini, meja informasi telah tersedia dan menjadi salah satu sarana utama dalam memberikan pelayanan informasi secara langsung
2. Keterbukaan melalui Media Sosial : Informasi terkait kegiatan dan program telah rutin diupdate
3. Keterbukaan melalui Website: Informasi berkala, setiap saat, serta serta merta telah diupdate dan dipublikasikan melalui website resmi BKK Kelas I I Pekanbaru**,** sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik..
4. Kegiatan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) telah dilakukan oleh BKK Kelas I Pekanbaru sebagai PPID Pelaksana yang merupakan bagian dari proses evaluasi mandiri atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di unit kerja.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

BKK Kelas I Pekanbaru akan terus melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh kanal layanan, sebagai upaya menjaga konsistensi pelaksanaan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Mengetahui,
Pejabat Penilai Kinerja

dr. Ziad Batubara, MPH
NIP 197002182002121001

Pekanbaru, September 2025
Ketua Pokja 2

NOVA SETYA NINGSIH, SE
NIP 198411262009122002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN MONEV

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TRIWULAN IV TAHUN 2025 BKK KLS I PEKANBARU



BKK KELAS I PEKANBARU
TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN MONEV
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN IV TAHUN 2025 BKK KLS I PEKANBARU

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan perbaikan dan penataan terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan yang baik, efektif dan efesien (good governance), sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, lemahnya pengawasan, serta minimnya keterbukaan informasi publik.

Seiring dengan hal tersebut, serta didukung oleh perkembangan teknologi informasi, membuat masyarakat semakin menyadari bahwa mendapatkan informasi merupakan hak mereka sebagai warga negara. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi terutama terkait penyelengaraan pemerintahan, mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan agar setiap instansi pemerintah melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Kesehatan sebagai salah satu instansi pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kesehatan, Balai kekarantinaan kesehatan kelas I pekanbaru diwajibkan menerapkan keterbukaan informasi publik. Penerapan keterbukaan informasi publik ini juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Salah satu upaya yang perlu dilakukan guna peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi di BKK Kelas I Pekanbaru dilakukan secara berkala.

B. DASAR HUKUM

1. UU no.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepoteisme
2. UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. Permenkes no.37 th 2019 tentang pedoman pengelolaan info publik di lingkungan kemenkes
4. Permenkes RI nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Kemenkes
6. komisi informasi no.1 th 2017 tentang pengklasifikasian info publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. komisi informasi no.1 th 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik
8. komisi informasi no.1 th 2010 tentang standar layanan informasi publik

C. TUJUAN

1. Mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku.
2. Mengetahui masalah-masalah atau kekurangan dalam penyampaian, pengelolaan, dan distribusi informasi kepada masyarakat.
3. Memberikan Dasar Rekomendasi Perbaikan:
4. Menjamin bahwa badan publik bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas penyediaan informasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meningkat..
5. Memperkuat Pengawasan Publik dan memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terkait kinerja badan publik dalam menyediakan informasi.

II. HASIL KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di BKK Kelas I Pekanbaru selama triwulan IV (Oktober – Desember 2025)

B. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

- Melakukan monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BKK Kelas I Pekanbaru melalui website dan media sosial
- Melakukan evaluasi melalui wawancara terhadap Tim medsos, PPID terkait hambatan dan kendala
- Pelaporan dan penyampaian hasil melalui rapat Monev TW IV BKK Kelas I Pekanbaru

C. HASIL MONITORING

Hasil monitoring dan Evaliasi Pelaksanaan keterbukaan informasi public di BKK Kelas I Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Layanan langsung di kantor

   Layanan ini memberikan akses langsung kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Saat ini, meja informasi telah tersedia dan menjadi salah satu sarana utama dalam memberikan pelayanan informasi secara langsung
2. Keterbukaan informasi publik melalui Media Sosial BKK kelas I Pekanbaru (Instagram, Youtube, Facebook)

   Selama periode bulan Oktober s/d Desember 2025 Tim medsos telah melakukan update informasi kegiatan-kegiatan program di BKK kelas I Pekanbaru antara lain :

   a. Dokumentasi Upacara hari kesaktian Pancasila
   b. Dokumentasi Pelantikan PPPK di BKK Pekanbaru
   c. Dokumentasi Pelatihan softskill dan manajemen emosi
   d. Hasil Survei kepuasan masyarakat TW III

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Edukasi tentang vaksinasi meningitis
f. Public campaigne Tolak gratifikasi
g. Informasi alur pelayanan penerbitan surat laik terbang
h. Buletin Epidemiologi
i. Dokumentasi kegiatan edukasi & skrining penyakit TB/HIV di wilayah kerja
j. Dokumentasi Upacara peringatan hari sumpah pemuda
k. Maklumat Pelayanan BKK Kls I Pekanbaru
l. Informasi tentang satu sehat mobile
m. Dokumentasi kegiatan Fogging
n. Dokumentasi kegiatan Senam sehat dan Cek kesehatan gratis
o. Dokumentasi kegiatan kunjungan kerja Dir.SKK dalam rangka Penyelidikan epidemiologi KLB penyakit Ispa di Puskesmas Batang Gansal Kab.Inhu
p. Dokumentasi kegiatan Latihan modular Airport emergency plan di BSSK II Pekanbaru
q. Layanan pengaduan masyarakat
r. Informasi tentang cegah kanker serviks dengan skrining HPV
s. Dokumentasi upacara peringatan HUT KOPRI ke 54
t. Publik campaigne tentang WBS
u. Informasi tentang infografis PAM Nataru

3. Keterbukaan Informasi Publik melalui website (http://www.bkkpekanbaru.com), adalah sebagai berikut :
   a. Daftar informasi publik BKK Kelas I Pekanbaru Tahun 2025
      1) Profil Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      2) Tupoksi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      3) Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      4) Profil Pejabat Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      5) Jenis Layanan Publik Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      6) Visi dan Misi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      7) Rekapitulasi Rekap Wajib Lapor LHKPN
      8) Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      9) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      10) Perjanjian Kinerja (PK) Balai Kekarantinaan
      11) Rencana Kerja dan Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      12) Rilis Berita Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
      13) Media Pengumuman (File Pengumuman dapat diunduh oleh semua)
      14) Buletin Elektronik (LAKKSAMANA)
      15) Laporan Tahunan Tahun 2024
      16) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024
      17) Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18) DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
19) Informasi Jumlah Pemohon Informasi
20) Daftar Informasi Publik (DIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
21) Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
22) Rekapitulasi Pengadaan barang / jasa Pemerintah
23) Informasi Tentang Hasil Pelaksanaan Kegiatan
24) SOP AP Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
25) Peta Jabatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
26) Daftar Komposisi Pegawai (Nama, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan)
27) Data Statistik Keuangan
28) Data Inventarisir BMN
29) Laporan Keuangan Audited Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
30) Laporan Barang Milik Negara (BMN) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
31) Laporan Pengaduan Masyarakat Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
32) Maklumat Pelayanan Informasi Publik
33) Tata cara Permohonan Informasi
34) Tata cara Pengajuan Keberatan
35) Tata cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
36) Tata cara Pengaduan Masyarakat
37) Ringkasan Laporan Layanan Informasi
38) SK PPID Tahun 2025

b. Informasi Berkala, Informasi setiap saat dan informasi serta merta

Proses pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran seluruh kategori informasi publik telah diselesaikan. Dengan demikian, seluruh Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta kini telah diperbarui dan dipublikasikan melalui website resmi BKK Kelas I Pekanbaru**,** sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik..

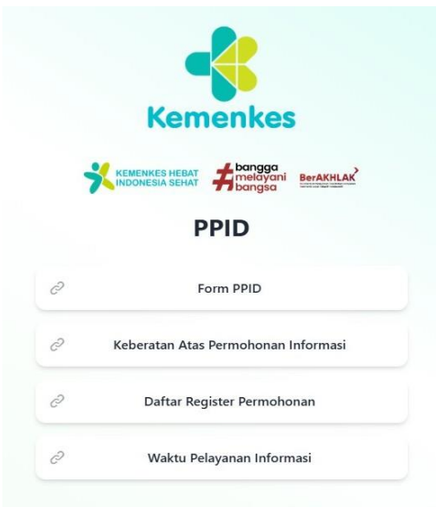
c. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena dapat membahayakan kepentingan negara, hak pribadi, atau rahasia bisnis. Informasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh BKK Kelas I Pekanbaru adalah:

- Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas

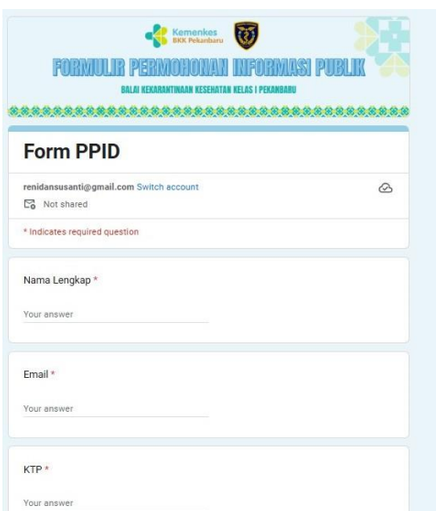
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : arsip dokumen kepegawaian identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin, identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian)
- Data identitas pengaduan masyarakat
- Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan
- Dokumen pengawasan tender
- Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa

d. Permohonan informasi pulik melalui website (PPID) adalah Mekanisme yang disediakan oleh badan publik untuk memungkinkan masyarakat mengajukan permintaan informasi secara online dengan mengisi form pada website BKK Kls I Pekanbaru, sebagai berikut :







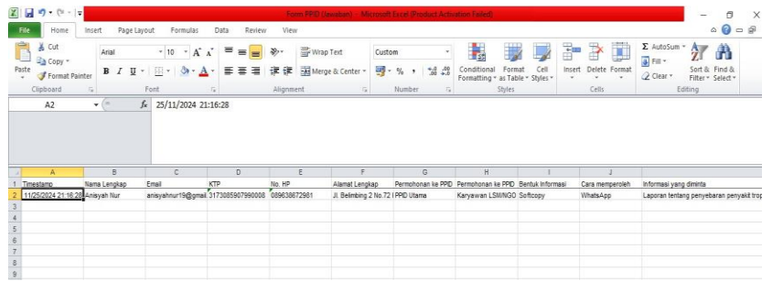


LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATKER BKK KELAS I PEKANBARU
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Bulan :Oktober - Desember 2025

NO	No.register permohonan informasi	Waktu penyelesaian sengketa	Permohonan informasi publik yang dikabulkan	Permohonan informasi publik yang ditolak	Permohonan keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa informasi			Keterangan
						Komisi informasi	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7			8
NIHIL									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

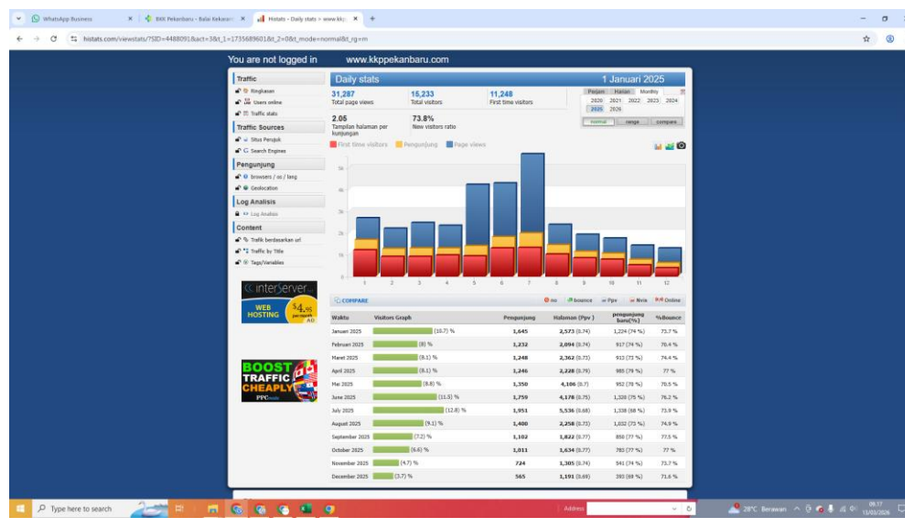


Timestamp	Nama Lengkap	Email	KTP	No. HP	Alamat Lengkap	Permohonan ke PPID	Permohonan ke PPID	Bentuk Informasi	Cara memperoleh	Informasi yang diminta
11/25/2024 21:16:28	Anisyah Ilsr	anisyahnurr9@gmail.com	3173085907990008	0896308729861	Jl. Belimbing 2 No.72	PPID Utama	Karyawan LSM/NGO	Softcopy	WhatsApp	Laporan tentang penyebaran penyakit trop

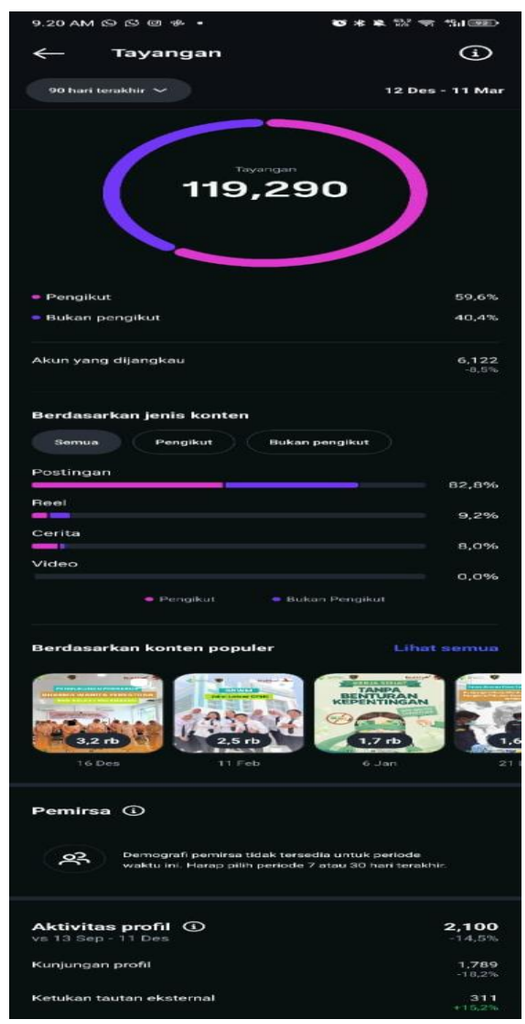
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari admin/pengelola website & PPID selama periode Oktober s/d Desember 2025 tidak ada permohonan informasi yang diterima.

e. Monitoring Layanan informasi di BKK Pekanbaru Tahun 2025

1) Website



2) Instagram



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

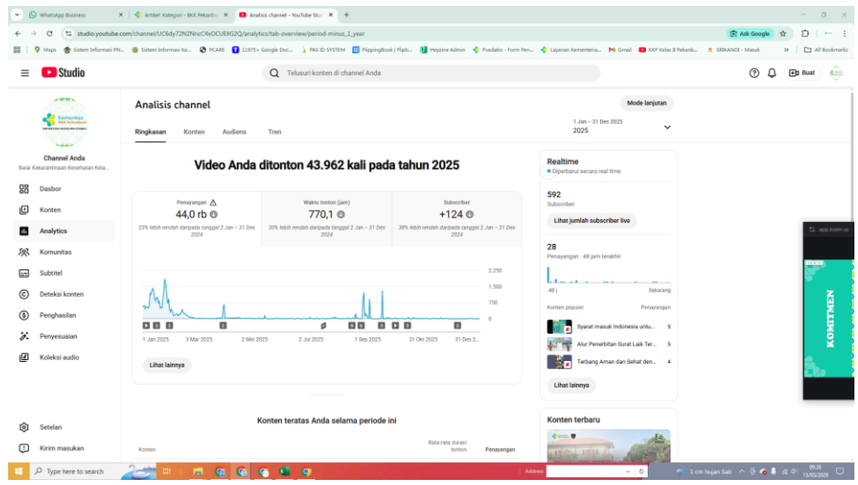
3) Facebook



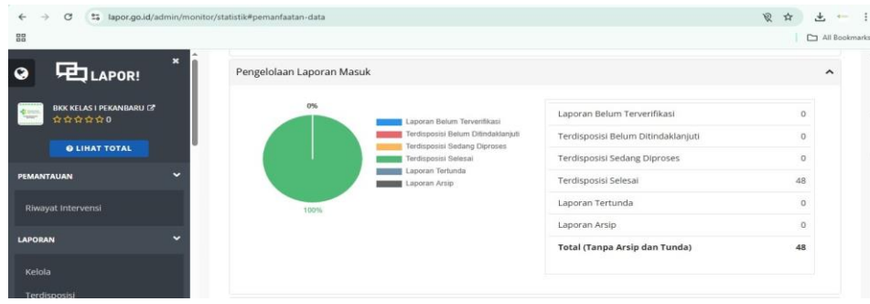


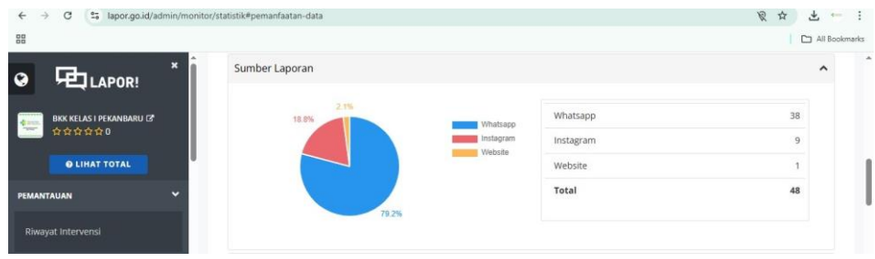
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

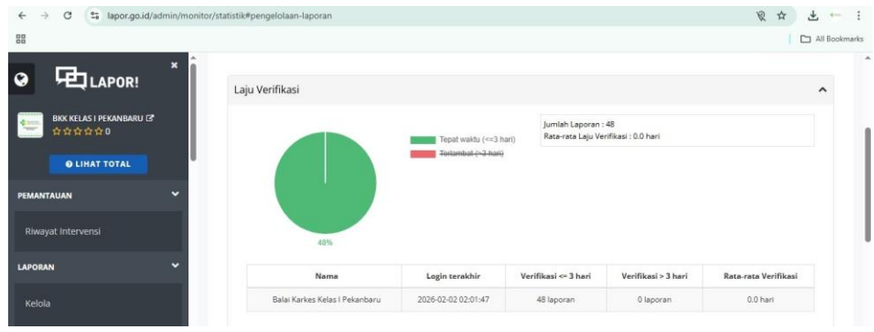
4) Youtube

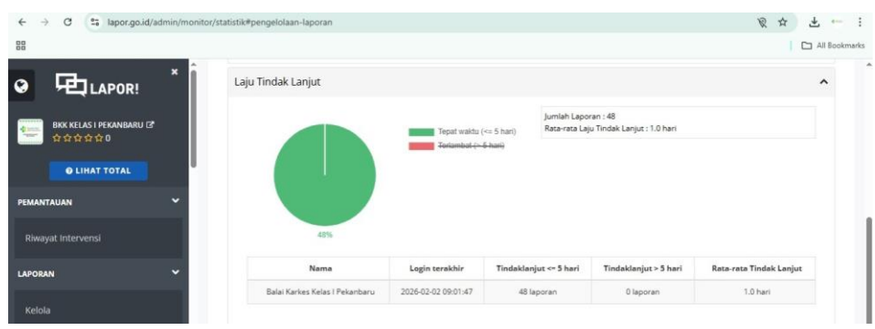


5) Span Lapor









Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Triwulan IV Tahun 2025 di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelayanan informasi publik telah berjalan dengan cukup baik. Layanan informasi langsung melalui meja layanan telah tersedia dan dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Penyebarluasan informasi melalui website resmi dan media sosial juga telah dilakukan secara rutin dan terstruktur, khususnya melalui publikasi dokumen-dokumen mandatory KIP serta berbagai update kegiatan program kerja instansi.

Website BKK Kelas I Pekanbaru telah memuat informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk daftar informasi publik, regulasi, laporan keuangan, SOP, dan mekanisme permohonan informasi. Selain itu, klasifikasi informasi yang dikecualikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU KIP dan peraturan terkait.

Selama periode triwulan IV, tidak ditemukan adanya permohonan informasi publik melalui kanal PPID online, serta tidak terdapat pengajuan keberatan informasi maupun sengketa informasi publik. Secara umum, pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah berjalan sesuai regulasi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Mempertahankan konsistensi update informasi sekaligus meningkatkan kualitas konten edukatif dan publikasi layanan agar informasi lebih mudah dipahami masyarakat.

Mengetahui,
Kepala BKK Kelas I Pekanbaru

dr. Ziad Batubara, MPH
NIP 197002182002121001

Pekanbaru, Desember 2025
Ketua Pokja 2

NOVA SETYA NINGSIH, SE
NIP 198411262009122002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).